

**DETEKSI DAN CEGAH DINI DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL
BERBASIS AGAMA OLEH BAKESBANGPOL KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Novita Lestari

NPP. 32.0630

Asdaf Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: novitalestari0103@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. Lalu Satria Utama, S.STP., M.AP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Handling religious-based social conflict is part of the state's efforts to maintain national stability, unity, and public order. In its implementation, the authority to conduct early detection and prevention is also delegated to local governments through institutional tools such as Bakesbangpol. Bakesbangpol plays an important role in detecting and preventing early religious-based social conflicts through cross-sector coordination, strengthening FKDM, and mapping conflict-prone areas, especially in East Lombok Regency which is one of the areas prone to religious-based social conflicts due to the spread of the Ahmadiyah sect (cult). **Purpose:** The purpose of this study was to determine early detection efforts in preventing religious-based social conflicts and the obstacles faced by the National Unity and Political Agency of East Lombok Regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research method with inductive approach. The data sources in this study are primary and secondary data sources. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and data verification. Data collection techniques include interviews, observation and documentation. **Result:** The results showed that the implementation of early detection and prevention in preventing religious-based social conflicts by Bakesbangpol East Lombok Regency was carried out through the fulfillment of indicators in the dimensions of early warning and rapid response carried out in the implementation of early detection and prevention in the regions, but there were inhibiting factors in the object of research, namely limited intelligence capabilities, low quality of human resources, and low community awareness and participation in efforts to prevent religious-based social conflicts. **Conclusion:** The implementation of early detection and prevention of Bakesbangpol East Lombok Regency has not been optimal in the early warning dimension while the rapid response dimension has been implemented quite well. The effectiveness of these activities experienced obstacles such as a lack of knowledge about intelligence and for

members and the absence of patrol and monitoring schedules. Researchers recommend intelligence training for members, the implementation of routine patrols, and continuous socialization to the community as a step to prevent religious-based social conflicts.

Keywords: *Early Detection, Prevention, Religious-Based Social Conflicts*



ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penanganan konflik sosial berbasis agama merupakan bagian dari upaya negara dalam menjaga stabilitas nasional, persatuan, serta ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kewenangan untuk melakukan deteksi dan pencegahan dini juga dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui perangkat kelembagaan seperti Bakesbangpol. Bakesbangpol berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah dini konflik sosial berbasis agama melalui koordinasi lintas sektor, penguatan FKDM, serta pemetaan wilayah rawan konflik terutama di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi konflik sosial berbasis agama karena penyebaran aliran Ahmadiyah (aliran sesat). **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama serta hambatan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam mencegah konflik sosial berbasis agama oleh Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan melalui pemenuhan indikator pada dimensi peringatan dini dan respon cepat yang dilakukan dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini di daerah, namun terdapat faktor penghambat pada objek penelitian yaitu terbatasnya kemampuan intelijen, rendahnya kualitas SDM, dan kepedulian serta partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap upaya pencegahan konflik sosial berbasis agama. **Kesimpulan:** Pelaksanaan deteksi dan cegah dini Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur belum optimal pada dimensi peringatan dini sedangkan dimensi respon cepat telah dilaksanakan dengan cukup baik. Efektivitas kegiatan tersebut mengalami kendala seperti kurangnya pengetahuan tentang intelijen dan bagi anggota dan tidak adanya jadwal patroli dan pemantauan. Peneliti merekomendasikan pelatihan intelijen bagi anggota, pelaksanaan patroli rutin, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan konflik sosial berbasis agama.

Kata Kunci: Deteksi Dini, Pencegahan, Konflik Sosial Berbasis Agama

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Konflik sosial merupakan bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan masyarakat, khususnya dalam negara yang majemuk seperti Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau dan dihuni oleh ratusan kelompok etnis dengan latar belakang budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat yang beragam, Indonesia memiliki kerentanan terhadap berbagai bentuk konflik, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Salah satu jenis konflik yang cukup kompleks dan sensitif adalah konflik sosial berbasis agama. Konflik ini tidak hanya menyangkut perbedaan keyakinan, tetapi juga berkaitan dengan identitas sosial, politik, serta relasi kekuasaan dalam masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, tertulis bahwa konflik sosial, yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik berbasis agama dapat berakar dari berbagai sumber, seperti perbedaan penafsiran ajaran, pertentangan nilai budaya, isu pendirian rumah ibadah, dan penyebaran paham radikal yang menimbulkan intoleransi. Jika tidak ditangani secara dini, konflik ini dapat berkembang menjadi kekerasan komunal yang sulit dikendalikan, seperti yang pernah terjadi di Poso, Ambon, dan beberapa wilayah lainnya. Oleh karena itu, pencegahan konflik berbasis agama merupakan kebutuhan mendesak yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana oleh semua pihak, khususnya pemerintah daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Salah satu penyebab terjadinya konflik sosial berbasis agama di Indonesia yaitu keberadaan kelompok minoritas di dalam kelompok mayoritas dalam penafsiran agama seperti jemaat Ahmadiyah. Kedatangan kelompok Ahmadiyah ini mendapat respon negatif dari masyarakat. Dengan jumlah jemaat yang sedikit atau minoritas membuat jemaat ini mudah untuk disudutkan. Aliran Ahmadiyah ditolak keberadaannya oleh masyarakat Islam di Indonesia, sehingga banyak ceramah yang berbau provokasi untuk memerangi Ahmadiyah semakin banyak dan menyebar yang dilakukan oleh pihak yang terganggu dengan adanya aliran Ahmadiyah tersebut. Dengan keadaan yang semakin mendesak membuat jemaat Ahmadiyah harus diusir dari tempat transit atau tinggalnya. Jemaat Ahmadiyah ini mendapat berbagai macam bentuk perlawanan dari warga, tindakan anarkis yang diterima oleh warga Ahmadiyah mengakibatkan kerusakan properti dan korban jiwa. Di sisi lain, Ahmadiyah juga tidak dibela dan tidak mendapat perlindungan hukum sama sekali dari polisi, bahkan pemerintah ikut menyudutkan keberadaan Ahmadiyah tersebut. Jemaat Ahmadiyah mendapat penolakan dari masyarakat khususnya di beberapa daerah. Jemaat Ahmadiyah tersebar di seluruh Indonesia, terutama di provinsi Nusa Tenggara Barat, namun penduduk setempat sangat menentang keras keberadaannya.

Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik sosial-budaya yang unik. Meskipun mayoritas penduduknya menganut agama Islam, terdapat juga pemeluk agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Buddha yang hidup berdampingan. Dalam konteks sosial masyarakat Lombok Timur, kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas daerah. Namun demikian, dinamika kehidupan sosial tidak luput dari potensi konflik, terutama ketika terjadi kesenjangan sosial, provokasi melalui media sosial, atau masuknya ideologi transnasional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kebangsaan. Mengingat maraknya perselisihan sosial yang bermotif agama, pemerintah harus menerapkan kebijakan sebagai langkah awal untuk mencegah konflik-konflik tersebut di dalam masyarakat sebagai bagian dari kewajiban dan fungsinya. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa penanganan konflik sosial merupakan bagian dari urusan pemerintahan umum. Selain itu, dalam pasal 9C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pemerintah berkewajiban melakukan pencegahan konflik bersama dengan pemerintah daerah meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan bangsa.

Salah satu tugas pemerintah yaitu melaksanakan deteksi dan cegah dini untuk mencegah terjadinya konflik sosial. deteksi dini merujuk pada identifikasi masalah atau kondisi yang mungkin berisiko dalam tahap awal sebelum berkembang menjadi lebih serius sedangkan cegah dini mencakup langkah-langkah dan strategi yang dirancang untuk menghindari terjadinya masalah serta risiko sebelum muncul. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur, peneliti tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian mengenai pelaksanaan deteksi dan cegah dini di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya cegah dan deteksi dini, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi konflik lebih awal dan tindakan yang dapat diambil untuk mencegah ketegangan yang lebih besar. Dalam perspektif teoritis, pendekatan pencegahan konflik dapat dilihat melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural menekankan pentingnya sistem kelembagaan dan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi konflik. Sementara itu, pendekatan kultural berfokus pada nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berkembang di masyarakat. Upaya deteksi dan cegah dini yang dilakukan Bakesbangpol idealnya mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut untuk menciptakan ketahanan sosial yang menyeluruh. Dengan demikian, pencegahan konflik tidak hanya dilakukan secara reaktif, tetapi juga proaktif dan transformatif. Penelitian ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana strategi dan praktik deteksi serta cegah dini terhadap konflik sosial berbasis agama diterapkan oleh Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur.

I.2 Kesenjangan Masalah (GAP Penelitian)

Pencegahan dini dapat diartikan sebagai usaha untuk menghindari masalah yang sudah teridentifikasi agar tidak muncul, serta untuk memastikan bahwa persoalan yang muncul tidak berdampak pada sistem yang sudah ada dan berfungsi. Konsep deteksi dini merujuk pada identifikasi masalah atau kondisi yang mungkin berisiko sebelum berkembang menjadi lebih serius. Konsep ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah sebelum berkembang menjadi lebih parah, sehingga memungkinkan penanganan yang lebih efektif dan mengurangi risiko lebih serius. Seiringan dengan pelaksanaan deteksi dan cegah dini yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di berbagai daerah, masih ditemukan kasus-kasus dimana ditemukannya kelompok-kelompok yang mengikuti aliran sesat yakni aliran Ahmadiyah. Seperti contohnya di Kabupaten Lombok Timur konflik sosial yang telah terjadi yaitu penyerangan jemaat Ahmadiyah di Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur yang terindikasi melaksanakan pengajian secara tersembunyi dan menyebarkan aliran agama sesat (data.ntbprov.go.id). Kelompok tersebut dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila dikarenakan menyebarkan ajaran agama sesat melalui pengajian, media massa, serta selebaran yang dibagikan ke masyarakat sekitar. Berdasarkan berita tersebut, dapat dikatakan pelaksanaan deteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut diberitakan sudah lama beraktivitas sejak tahun 1960-an. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama di Kabupaten Lombok Timur agar bisa maksimal.

I.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya akan dijadikan referensi dan perbandingan oleh peneliti saat ini. penelitian ini menjelaskan inisiatif yang sudah dilaksanakan untuk mengelola dan mencegah perselisihan sosial di berbagai daerah.

Pelibatan Masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Menghindari Konflik Sosial di Kota Administrasi Jakarta oleh Lukman Hakim dan Eka Dewanti (2020) . Hanya dengan mengidentifikasi kemungkinan kejadian di lingkungan sekitar melalui deteksi dini, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dapat menghindari konflik sosial. Jika ada indikasi yang dapat menimbulkan konflik, laporan harus disampaikan kepada pemerintah setempat dan pihak berwenang yang menangani masalah tersebut, agar dapat dilakukan survei dan tindak lanjut yang diperlukan. Meskipun sebagian besar masih mengandalkan sumber daya mereka sendiri, para anggota Forum sejauh ini telah memberikan kontribusi yang sangat baik dalam bentuk uang, waktu, dan ide. Meskipun para anggota menerima honor setiap bulan, jumlahnya masih di bawah UMP. Selain itu, di beberapa komunitas tertentu, Forum Kewaspadaan Dini dan pihak-pihak terkait tidak berkoordinasi atau bekerja sama, sehingga sulit untuk berbagi informasi dan mencegah konflik sosial.

Penelitian terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Pencegahan Konflik Sosial Di Kota Probolinggo) oleh Prautami Sintaresmi dkk (2022). Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan strategi penanganan konflik sosial tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Selain itu, Strategi juga diperlukan untuk menyelesaikan konflik sosial di Kota Probolinggo untuk mengatasi hambatan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, upaya Kota Probolinggo untuk mengelola konflik sosial-khususnya melalui pencegahan, telah berhasil menciptakan situasi yang kondusif di daerah tersebut.

Penelitian terkait Kontribusi Pemerintah Daerah Lombok Barat terhadap Konflik Sosial di Desa Mareje oleh Armita Arvianti (2023). Berbeda dengan apa yang diberitakan oleh media, kekerasan yang terjadi di Desa Mareje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah konflik sosial dan bukan konflik SARA. Dengan membentuk Pusat Mediasi, pemerintah melalui FORKOPIMDA dan FKUB, berkolaborasi dengan para tokoh adat dan masyarakat untuk mengatasi konflik tersebut. Penyelesaian di Mareje mengutamakan pendekatan adat dan kearifan lokal, bukan melalui jalur hukum. Berbagai langkah mitigasi diambil untuk mencegah terjadinya konflik lebih lanjut. Selain itu, pemerintah juga mengumpulkan media untuk mengklarifikasi bahwa konflik ini bukanlah Konflik SARA, guna mencegah penyebaran isu tersebut menjadi isu nasional.

Di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan penelitian tentang deteksi dini dalam pencegahan radikalisme dan terorisme oleh Anas Ramadhan (2024). Karena kurangnya ilmu intelijen, deteksi dini di Kota Bima masih belum optimal dalam memerangi terorisme dan radikalisme. Tidak adanya SDM yang cukup dan anggaran yang kecil untuk membantu pelaksanaan deteksi dini merupakan salah satu tantangan.

Penelitian terkait Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menangani Perselisihan Umat Beragama di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Vihara Virya Paramitha di Kota Bandar Lampung) oleh Nunik Desi Metiasa (2024). Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangani konflik sosial dengan 3 indikator yaitu akomodasi, kompromi, dan kolaborasi. Konflik ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara kedua pihak. Berdasarkan hasil penelitian strategi penyelesaian konflik dengan 3 indikator ini berhasil menyelesaikan konflik. Setelah berakhirnya konflik tersebut maka strategi yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini konflik sosial di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, peneliti dapat menunjukkan orisinalitas penelitian deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama oleh Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur dari segi objek, teori, tujuan, hasil penelitian, judul, fokus dan lokusnya tetapi memiliki persamaan dari segi pemilihan metode penelitian karena kesamaan permasalahannya.

I.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama oleh Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu wilayah yang rawan konflik untuk mendukung upaya deteksi dan pencegahan dini di daerah untuk menjaga stabilitas serta ketertiban umum di daerah. Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah dalam bentuk analisis mendalam terhadap strategi, mekanisme kerja, serta efektivitas pelaksanaan deteksi dan cegah dini yang dijalankan oleh Bakesbangpol, khususnya dalam konteks konflik sosial berbasis agama. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap dinamika sosial, pendekatan koordinatif lintas sektor, serta hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan, sehingga diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pencegahan konflik sosial di daerah-daerah rawan lainnya. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan salah satu teori dari Ichsan Malik yaitu deteksi dan cegah dini yang menyatakan bahwa pelaksanaan program dapat dilihat melalui 2 (dua) aspek yaitu peringatan dini (*early warning*) dan respon cepat (*early response*).

I.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama. Disamping itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta upaya apa yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Lombok Timur dalam mengatasi hambatan yang ada.

II. METODE

Sugiyono (2010: 2) menjelaskan bahwa cara menyelesaikan permasalahan penelitian memerlukan langkah-langkah yang teratur dan hati-hati, termasuk penggunaan metode penelitian yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Berdasarkan pemaparan yang dituliskan oleh Sugiyono (2013), metode kualitatif yaitu metode yang sesuai dengan filsafat dan peneliti mempunyai kedudukan sebagai instrumen. Adapun data yang disajikan tidak dalam bentuk angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, beberapa jenis laporan, arsip pribadi, dan dokumen pendukung lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan dan mendeskripsikan upaya deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama oleh Bakesbangpol Kabupaten Lombok Timur. Penelitian dilakukan secara tidak langsung di lapangan melalui observasi non partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen utama (Simangunsong:2016) didukung alat bantu seperti pedoman wawancara dan alat perekam. Operasional konsep deteksi dan cegah dini yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan menurut teori deteksi dan cegah dini sesuai pemaparan Ichsan Malik (2017), teori dari dimensi ini untuk menggambarkan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama oleh Bakesbangpol

Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu peringatan dini (*early warning*) dan respon cepat (*early response*).

Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* untuk pejabat di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang dianggap sebagai ahli pada permasalahan yang akan diteliti dan Teknik *snowball sampling* untuk masyarakat untuk mendapatkan informasi yang spesifik yang mewakili suatu populasi dengan melakukan wawancara bertahap dari satu informan ke informan yang lainnya, dengan total 16 informan. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan tiga tahap analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yaitu pada tahun 2024/2025 dan penelitian berlokasi di Kabupaten Lombok Timur karena rawannya terjadi konflik sosial berbasis agama di wilayah tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Deteksi dan Cegah Dini Dalam Pencegahan Konflik Sosial Berbasis Agama Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penulis menganalisis pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan teori dari Ichsan Malik yang menyatakan bahwa pelaksanaan dapat dilihat melalui 2 (dua) aspek yaitu peringatan dini (*early warning*) dan respon cepat (*early response*). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

1. Peringatan Dini (*Early Warning*)

Peringatan dini yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan negara. Melalui deteksi dini terhadap potensi ancaman seperti konflik sosial, radikalisme, ekstremisme, atau gangguan keamanan lainnya, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekacauan yang lebih besar. Aspek peringatan dini memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

Pengumpulan Data Potensi Konflik. pengumpulan data potensi konflik telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bekerjasama dengan aparat keamanan, tokoh agama dan masyarakat, serta FKDM. Pengumpulan data potensi konflik ini berlandaskan pada kegiatan pemantauan yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berbagai pihak terkait. Pengumpulan data potensi konflik belum dilakukan secara maksimal karena kegiatan pemantauan tersebut tidak dilakukan secara terjadwal dan rutin serta pegawai yang melakukan pemantauan tersebut kebanyakan belum memiliki kemampuan intelijen yang baik. Pelatihan

intelijen sangat penting dilakukan oleh semua anggota Bakesbangpol untuk meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan data potensi konflik yang terjadi.

Analisis Resiko. Analisis potensi resiko ini dilakukan dengan patroli ke wilayah yang rawan konflik yang dilakukan oleh Bakesbangpol dibantu Bhabinkamtibmas dan Babinsa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Akan tetapi, patroli yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal masih terdapat kekurangan yaitu kegiatan patroli yang dilakukan masih kurang efektif yang menyebabkan menurunnya kemampuan dalam mendeteksi perubahan secara signifikan.

Tabel 1.

Jumlah Patroli Rutin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur

| No. | Bulan/Tahun | Patroli atau Pemantauan |
|---------------|----------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Januari 2024 | 3 Kali |
| 2. | Februari 2024 | 2 Kali |
| 3. | Maret 2024 | 2 Kali |
| 4. | April 2024 | 1 Kali |
| 5. | Mei 2024 | 1 Kali |
| 6. | Juni 2024 | 1 Kali |
| 7. | Juli 2024 | 2 Kali |
| 8. | Agustus 2024 | 3 Kali |
| 9. | September 2024 | 1 Kali |
| 10. | Oktober 2024 | 1 Kali |
| 11. | November 2024 | 2 Kali |
| 12. | Desember 2024 | 3 Kali |
| Jumlah | | 22 Kali |

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa dengan pelaksanaan patroli oleh Kesbangpol yang dilakukan 1 sampai 3 kali dalam sebulan yang menurut peneliti masih kurang efektif karena dapat mengurangi kemampuan untuk mendeteksi perubahan

signifikan. Frekuensi ideal untuk patroli atau pemantauan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur dalam rangka mencegah konflik sosial berbasis agama lebih ideal dilakukan setiap minggu untuk mendeteksi perubahan-perubahan signifikan dalam aktivitas jemaat pengikut aliran Ahmadiyah. Frekuensi yang lebih tinggi akan memungkinkan untuk respons yang lebih cepat terhadap perubahan situasi, serta memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan menyeluruh.

Penyediaan Informasi. Dalam penyediaan informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur sudah transparans, cepat respons, validitas data, dan menyebarkan informasi secara berkala melalui berbagai saluran. Dalam upaya menyediakan informasi Bakesbangpol juga melibatkan tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau masyarakat luas. Namun, meskipun langkah-langkahnya sudah baik, efektivitasnya tetap bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan tantangan seperti penyebaran hoaks di media sosial. Meskipun tergolong maksimal, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan tetap diperlukan agar sistem penyediaan informasi semakin kuat dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Rekomendasi Untuk Para Pemangku Sistem yang Dituju. Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, seperti pemberian rekomendasi berbasis data dan kronologi, mediasi antar kelompok, edukasi masyarakat tentang dampak konflik, pembentukan forum koordinasi (Forkopimda), serta pendekatan berbasis kearifan lokal. Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI, POLRI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga menunjukkan adanya sinergi yang kuat. Namun, karena keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan daerah dan tidak semua upaya pencegahan dapat menjamin tidak terjadinya konflik, maka ruang untuk peningkatan dan evaluasi tetap ada. Jadi, meskipun sudah maksimal dalam pelaksanaan peran dan fungsi yang dimilikinya, masih diperlukan penyempurnaan dalam sistem dan efektivitas pelaksanaannya.

2. Respon Cepat (*Early Response*)

Respon cepat dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) merujuk pada kemampuan dan tindakan yang cepat dan tepat dari Bakesbangpol dalam merespons dan menangani ancaman atau potensi gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan keamanan negara. Respon cepat ini melibatkan serangkaian langkah-langkah yang diambil dalam waktu singkat setelah adanya indikasi ancaman. Aspek respon cepat memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

Pencegahan Secara Langsung. Berbagai langkah pencegahan telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur secara terencana, seperti sosialisasi kepada berbagai kelompok masyarakat, mediasi, serta pemantauan oleh FKDM, namun masih terdapat kendala yang cukup signifikan. Kendala tersebut meliputi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial yang memperkeruh suasana, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam meredam konflik. Faktor-faktor

ini menghambat efektivitas program pencegahan yang telah dirancang. Maka dari itu, meskipun sudah menunjukkan arah yang positif dan adanya komitmen, pelaksanaannya belum bisa dikatakan maksimal karena masih membutuhkan peningkatan dari sisi literasi digital masyarakat, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam menjaga ketertiban sosial.

Tabel 2.

Kegiatan Sosialisasi Tentang Bahaya Konflik Sosial Berbasis Agama oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur

| No. | Bulan/Tahun | Sasaran Sosialisasi |
|-----|----------------|---------------------------------------|
| 1. | Januari 2024 | Pelajar SMA/SMK Kecamatan Sakra Timur |
| 2. | Maret 2024 | Kelompok Kerukunan Umat Beragama |
| 3. | Mei 2024 | Kelompok Majelis Taklim |
| 4. | Juli 2024 | Kelompok Pemuka Agama |
| 5. | September 2024 | Pelajar SMA/SMK Kecamatan Sakra Timur |
| 6. | November 2024 | Kelompok ASN dan Tenaga pendidikan |

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025

Berdasarkan tabel data di atas dapat disimpulkan bahwa jadwal sosialisasi terkait bahaya konflik sosial berbasis agama pada tahun 2024 yang disampaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur dilakukan 6 (enam) kali kegiatan sosialisasi setiap tahunnya sudah efektif, terlihat adanya upaya yang terencana dan sistematis dalam melakukan pencegahan terhadap konflik sosial berbasis agama. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan harus terencana dan sistematis dalam melakukan pencegahan terhadap konflik sosial berbasis agama. Penetapan sasaran sosialisasi yang melibatkan beragam kelompok menunjukkan kesadaran akan pentingnya melibatkan semua lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan. Selain itu, penyebaran lokasi sosialisasi yang merata di berbagai kecamatan dan wilayah di Kabupaten Lombok Timur memungkinkan pesan pencegahan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat secara luas.

Dialog Perdamaian. Dialog perdamaian dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

1. Adanya komunikasi formal dan informal yang terjalin secara aktif dengan pihak-pihak terkait seperti TNI, POLRI, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

2. Terbentuknya kesepakatan damai antara Jemaat Ahmadiyah dan pemerintah serta masyarakat, yang menghindari konflik berkepanjangan.
3. Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan membantu meredam penyebaran hoaks atau ujaran kebencian.
4. Kolaborasi lintas sektor yang memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi konflik.

Namun, masih ada beberapa kendala, seperti kurangnya keterbukaan dalam dialog, dominasi kepentingan kelompok, dan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya komunikasi dalam mendeteksi dini konflik. Oleh karena itu, pelaksanaannya dapat dikatakan baik, namun masih memerlukan penguatan di beberapa aspek agar lebih optimal dan berkelanjutan.

Pemberian Sanksi Untuk Mempengaruhi Perilaku Pelaku Utama Konflik.

Terdapat langkah-langkah seperti pemberian sanksi sosial dan pembinaan yang menunjukkan adanya upaya serius, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah dominasi tuntutan masyarakat terhadap hukuman tanpa dibarengi pendekatan edukatif dan damai, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya solusi jangka panjang, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait. Oleh karena itu, meskipun sudah ada arah kebijakan yang baik, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar sanksi benar-benar berdampak positif, adil, dan berkelanjutan dalam mencegah konflik serupa di masa mendatang.

3.2 Faktor Penghambat Dari Pelaksanaan Deteksi dan Cegah Dini Dalam Pencegahan Konflik Sosial Berbasis Agama Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kualitas Sumber Daya Manusia. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur harus memiliki SDM yang unggul untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan deteksi dan cegah dini yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian, target-target yang telah ditentukan dapat tercapai. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, penulis menyimpulkan bahwa kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini dapat diasumsikan masih kurang dikarenakan kurangnya pelatihan, tetapi juga oleh minimnya pemahaman pegawai terhadap tugas dan fungsinya dalam mendukung intelijen. Keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh sebagian besar pegawai berdampak pada kurang optimalnya upaya deteksi dini terhadap potensi ancaman di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk terus meningkatkan kapasitas pegawai,

baik melalui pelatihan formal maupun dengan memanfaatkan pegawai yang sudah memiliki kompetensi di bidang intelijen sebagai aset internal dalam penguatan sistem deteksi dini.

Kurangnya Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat dalam Cegah dan Deteksi Dini Konflik Sosial. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa informan, penulis menemukan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap cegah dan deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama di Kabupaten Lombok Timur masih tergolong rendah, terutama dalam aspek pelaporan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam mendeteksi dan melaporkan potensi konflik, serta kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan yang tersedia. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan lembaga yang menangani konflik juga masih rendah. Sebagian besar warga merasa ragu apakah laporan mereka akan ditindaklanjuti dengan serius, atau justru menimbulkan risiko terhadap diri mereka sendiri, seperti stigma sosial maupun ancaman keamanan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi sosial masyarakat, memperkuat jejaring komunikasi antarwarga dan antarlembaga, serta membangun sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, dan terpercaya.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap sejumlah penelitian terdahulu, peneliti mampu mengidentifikasi dengan jelas perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dari aspek teori yang digunakan, kondisi sosial lokasi penelitian, hingga objek penelitian. Penelitian sebelumnya umumnya menyoroti pelaksanaan kewaspadaan dini dalam pencegahan konflik sosial melalui pendekatan collaborative governance, penguatan regulasi, serta efektivitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, fokus utamanya seringkali berada pada pelibatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TTPKS), maupun lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra dalam mengidentifikasi dan merespons potensi konflik. Pendekatan tersebut cenderung menekankan peran kolektif antarlembaga dan masyarakat dalam mendeteksi indikasi konflik secara umum, tanpa menelusuri secara mendalam dimensi konflik berbasis agama, khususnya pada kasus komunitas minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengambil studi kasus di Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan daerah dengan sejarah konflik sosial berbasis agama yang nyata dan terdokumentasi, seperti insiden penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah pada tahun 2018. Objek penelitian difokuskan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lombok Timur sebagai lembaga teknis pemerintah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini terhadap potensi konflik. Hal ini menjadi pembeda utama dari penelitian sebelumnya yang cenderung menyoroti forum atau pendekatan non-birokratis. Peneliti

menggunakan teori Conflict Early Warning and Response System (CEWERS) sebagai kerangka analisis utama, yang terdiri dari dua komponen penting, yaitu early warning (peringatan dini) dan early response (tanggapan cepat). Kerangka ini digunakan untuk mengevaluasi bagaimana Bakesbangpol mengidentifikasi gejala awal konflik serta mengambil langkah preventif sebelum eskalasi terjadi.

Dari sisi pendekatan metodologis, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan peran sebagai instrumen kunci dalam proses penggalian data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ini memungkinkan peneliti memperoleh makna mendalam dan menggambarkan fenomena sosial sebagaimana adanya di lapangan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan deteksi dini oleh Bakesbangpol belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan intelijen, kurangnya anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan informasi. Berbeda dengan penelitian di daerah lain yang sudah menggunakan sistem berbasis teknologi seperti aplikasi pelaporan konflik atau SiCekal (Sistem Cegah Dini Analisa dan Laporan) di Kutai Kartanegara, penelitian ini menunjukkan bahwa di Lombok Timur, proses deteksi konflik masih banyak bergantung pada pendekatan konvensional dan hubungan personal antara petugas dan tokoh masyarakat.

Dengan demikian, posisi penelitian ini menjadi jelas dalam peta keilmuan: sebagai kajian yang mengisi kekosongan dalam literatur dengan cara menyoroti pelaksanaan deteksi dan cegah dini oleh institusi formal (Bakesbangpol) dalam konteks konflik sosial berbasis agama yang nyata dan kompleks. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis bagi Bakesbangpol untuk memperkuat perannya, antara lain melalui peningkatan kapasitas intelijen, pelaksanaan patroli rutin, dan penguatan sinergi dengan tokoh agama serta masyarakat sipil. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga panduan kebijakan yang berguna bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi konflik serupa di masa mendatang.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial berbasis agama yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur dikatakan belum maksimal.
2. Hambatan yang dihadapi yaitu : 1) Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur belum memadai dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta keterbatasan ilmu intelijen yang dimiliki. 2) Tingkat kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan deteksi dini konflik sosial agama yang masih kurang. Dengan adanya

hambatan tersebut, kualitas program kerja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur menjadi tidak efektif dan efisien.

Keterbatasan penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni informasi yang kurang lengkap dikarenakan penelitian berhubungan dengan informasi intelijen sehingga tidak memiliki akses terbuka untuk dipublikasikan secara umum. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan waktu dan biaya penelitian karena penelitian hanya dilakukan di satu desa.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur dapat mengarahkan anggota untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tambahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dari anggota Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur mengenai ilmu intelijen agar berguna dalam kelancaran tugas di lapangan. Selain itu, penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama yang berkaitan dengan deteksi dan cegah dini konflik sosial berbasis agama untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Dengan penuh rasa hormat, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si selaku Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat, Ibu Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si selaku Ketua Prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Bapak Dr. Lalu Satria Utama, S.STP., M.AP selaku dosen pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti, Seluruh Civitas Akademika IPDN yang telah mendidik, melatih, dan membimbing peneliti, Seluruh rekan Angkatan XXXII khususnya rekan-rekan dan adik-adik dari kontingen Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur beserta seluruh OPD khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan kesempatan dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anadirga C, Nurdin N, Sinurat M. (2024). “Efektivitas Penanganan Konflik Sosial Oleh Tim Terpadu di Provinsi DKI Jakarta”. *Journal of Government, Social and Politics*. 10 (2): 8230.
- Anom, E., Noor, D., & Sinaga, O. (2022). “Conflict Mapping Communication in an Effort to Reduce Social Conflict to Overcome Social Problems in Riau

- Province, Indonesia*". Journal of Positive School Psychology, 3 (6), 9356–9374. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Arvianti A, Setiawan B, Syamsunasir, Widodo P. (2023). "Peran pemerintah daerah Lombok Barat terhadap konflik sosial di Desa Mareje". J Ilmu Sos dan Pendidik. 7(3):2598-9944.
- Dasopang, M., Naution, F.A., & Lubis. A. (2022). "The role of religious and cultural education as a resolution of radicalism conflict in Sibolga community". https://hdl.handle.net/10520/ejc-hervorm_v79_n1_a8469
- Fakhrul dan Khairulyadi. (2017). "Deteksi Dini dalam Penyelesaian Konflik Oleh Kesbangpol Provinsi Aceh". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2(4).
- Gaffar, A. (2023). The conflict dynamics of Ahmadiyya Lombok: Public services and negative stigma. *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 8(1), 70–82. <https://doi.org/10.30983/fuaduna.v8i1.8507>
- Hakim L, Dewanti E. (2020). "Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan". Public Adm J. 4(1):69-82. <https://jakarta.bps.go.id/>
- Harepa, D., Rowa, H., & Ilham, M. (2019). "Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11 (4). Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Kumalasari, E. D., Latifa, I., Aminarsih, R., Damayanti, F. F., & Mubarak, Z. I. (2022). Religious conflict in Indonesia: Crisis of tolerance and violations of human rights against Ahmadiyah. *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.26740/metafora.v6n2.p19801>
- Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2017.
- Metiasa, N. (2024). "Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Mengelola Konflik Agama di Masyarakat Kota Bandar Lampung (Studi Pendirian Rumah Ibadah Vihara Virya Paramitha Kota Bandar Lampung)".
- Prastasena, R. Utama, L. (2024). "Cegah Deteksi Dini Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah". *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4 (2), (465-474). Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Putri, P. N. (2023). Ahmadiyya community in Indonesia's contemporary discourse: State's indecisive protection to the freedom of religion and belief. *International Journal of Social Service and Research*, 3(6). <https://doi.org/10.46799/ijssr.v3i6.406>
- Ramadhan A. (2024). "Deteksi Dini Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat". Published online 2024. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

- Ristanti, D. N. (2022). Interreligious violent conflict resolution: “*Discoursing communal violence between Christians and Moslems in Poso City, Indonesia.*” *Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies*, 1(1), 25–39. <https://doi.org/10.20956/hjsis.v1i1.24845>.
- Subagyo, A., & Rusfiana, Y. (2019). “*Sinergi Tni Ad Dengan Polri Dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Di Kota Tarakan)*”, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(2), 113., Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Simangunsong, F. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet.1. Bandung : Alfabeta.
- Sintaresmi P, Muchsin S, Ahmadi R. (2022). “*Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Pencegahan Konflik Sosial Di Kota Probolinggo)*”. *J Acad praja*. 5(1):56-72.
- Soemaatmadja, R., Supriatna, T., Rowa, H., Kusworo, K. (2020). “*Kebijakan Wawasan Kebangsaan dan Penanganan Konflik Sosial Dalam Perspektif Collaborative Governance di Kabupaten Pandeglag.*” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*; 2010.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliani, D. P., Utama, L. S., Syaefullah, & Abdurahman. (2025). “*Penataan Konflik Antar Desa di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.*” *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(9), 6529–6542., Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.